

DAFTAR PUSTAKA

1. Sulaeman, Endang Sutisna. Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2009
2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2009
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2014
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2014
5. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2004
6. Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 2016
7. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2014
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 2017
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2017
10. Dokumentasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kota Payakumbuh Bulan Juli tahun Anggaran 2018. Payakumbuh: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh; 2018
11. Dokumentasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2017. Payakumbuh: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh; 2017

12. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Menteri Keuangan RI; 2017
13. Dokumentasi Laporan Realisasi penggunaan DAK Bidang kesehatan BOK puskesmas Tarok bulan Januari sampai dengan September tahun 2018. Payakumbuh: Puskesmas Tarok Kota Payakumbuh; 2018
14. Dokumentasi Laporan Realisasi Penggunaan DAK Bidang Kesehatan BOK Puskesmas Payolansek bulan Januari sampai dengan Oktober 2018. Payakumbuh: Puskesmas Payolansek Kota Payakumbuh; 2018
15. Mariane Evelyn dkk. Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Tiga Puskesmas Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2012;1:161-167
16. Hendry Mulyawan dkk. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan (studi kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong tahun 2011). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2012; 1: 144-153
17. Anwar, Azrul. Pengantar Administrasi Kesehatan edisi ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara; 2010
18. Darmawan, Ede Surya, dkk. Administrasi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rajagrafindo Persada; 2016.
19. Ayuningtyas, Dumillah. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktek. Jakarta: Rajagrafindo Persada; 2014.
20. Rusdiana, dkk. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia; 2014
21. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010
22. Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada; 2015.
23. Bustami. Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya. Padang : Gelora Aksara Pratama; 2011.
24. Satori, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010
25. Ainy, Asmaripa. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2012;1: 7-12
26. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2004

27. Pemerintah Republik Indonesia. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2014
28. Dodo, Dominirsep Ovidius. Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan, didaerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2014;3: 82-96
29. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2014
30. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI; 2007
31. Sepianessi, Elis, dkk. Analisis Pengelolaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir tahun. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. 2014;5;3
32. Astiena, Adila Kasni. Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan. Padang: Andalas University Press; 2015
33. Sulaeman, Endang Sutisna. Manajemen Kesehatan Teori dan Praktek di Puskesmas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2009
34. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI; 2017
35. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI; 2006
36. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2017
37. Laeliah, Nurul Siti, dkk. Hubungan Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan peningkatan cakupan kunjungan Antenanal K4 di Puskesmas Kota Serang tahun 2014-2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2017; 3: 115-126.
38. Pelealu, Angelina, dkk. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Nontunai Dalam Pengelolaan Kuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 2018: 220-230
39. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pedoman Pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Nonfisik). Payakumbuh: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota; 2018

40. Lisnawaty, Susianti,dkk. Studi tentang Pengelolaan Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. 2017;2;7
41. Dasmal, dkk. Studi Evaluasi Program Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten Luwu. Jurnal AKK. 2013;2: 1-7.
42. Parawansa, Muh. Imam Maulana,dkk. Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Jeneponto [Skripsi]. Kabupaten Jeneponto: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ;2014
43. Pemerintah Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2016
44. Dokumen Profil Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018. Payakumbuh: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota; 2018
45. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2016

